

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**  
**PD. BPR BKK WONOGIRI**  
**TAHUN 2017**

**PENDAHULUAN**

Tata Kelola yang diterapkan PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK WONOGIRI mengacu pada Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685) yang selanjutnya disebut POJK Tata Kelola BPR.

Tata Kelola yang diterapkan di PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK WONOGIRI menerapkan prinsip – prinsip:

1. Keterbukaan (*transparency*), mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *Stakeholders* (pemangku kepentingan) dan masyarakat, dimana pelaksanaan *transparency* ini tercermin dalam laporan keuangan publikasi yang diterbitkan setiap 3 (tiga) bulan sekali (*triwulan*) dan dipasang di papan pengumuman serta diunggah di website PD BPR BKK WONOGIRI. Khusus laporan keuangan publikasi *triwulan* IV sudah melalui proses auditing dari Akuntan Publik yang terdaftar di OJK serta dimuat di media masa lokal harian.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Hal ini diupayakan semaksimal mungkin oleh manajemen dengan memfungsikan sistem pengendalian intern melalui Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) secara efektif, memfungsikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Teknologi Sistem Informasi (TSI) secara efektif, mewajibkan setiap organ perusahaan untuk melakukan pengawasan melekat, mengupayakan terciptanya budaya sadar risiko pada semua organ perusahaan, merumuskan pelaksanaan *reward and punishment* serta mengupayakan terciptanya *corporate value* yang tinggi terhadap perusahaan.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Operasional PD BPR BKK WONOGIRI mengacu pada PBI, POJK, PPATK, LPS, Perda dan perundang undangan yang berlaku dan relevan untuk

BPR serta melakukan pengkinian Kebijakan dan Prosedur operasional Perusahaan sesuai dengan peraturan terkini yang berlaku.

4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Untuk saat ini PD. BPR BKK WONOGIRI belum memiliki Dewan Pengawas Independen, namun keberadaan Dewan Pengawas ini menjadi kontrol dan penyeimbang setiap kebijakan yang diambil oleh Direksi.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

## **LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

### **1. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola**

#### **a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

- i. Jumlah dan komposisi anggota Direksi :

Jumlah anggota Direksi 3 (tiga) orang :

- **Sucipto, SE** sebagai Direktur Utama, diangkat berdasarkan RUPS LB Tanggal 27 Maret 2014.
- **Sarti, SE.MM** sebagai Direktur Umum merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan diangkat melalui RUPS-LB tanggal 20 September 2017.  
Direktur Utama dan Direktur Umum diangkat berdasarkan RUPS LB Tanggal 27 Maret 2014.  
Pengangkatan Direktur Umum dan Kepatuhan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat nomor KP-01/1347/X/SU/2017 dan telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-510/KO.0301/2017 tanggal 13 Desember 2017.
- **Suwarto, SE** sebagai Direktur Pemasaran diangkat berdasarkan RUPS LB Tanggal 14 Juli 2014. Pengangkatan Direktur Pemasaran dilaporkan ke OJK melalui surat Nomor KP-01/1128/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 dan telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-570/KO.421/2014 tanggal 2 september 2014.

ii. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas

Direktur Utama dan anggota Direksi yang lain telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik dan secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas. Rekomendasi Dewan Pengawas tertuang dalam Notulen rapat yang diselenggarakan bersama dengan anggota Direksi. Beberapa hal penting dari Rekomendasi Dewan Pengawas yang telah dilaksanakan oleh Direksi diantaranya adalah sebagai berikut :

- Rapat Tanggal 27 Januari 2017, telah melakukan tes penjarangan calon pejabat pada tanggal 02 Maret 2017 oleh Akuntan Rahmad Wahyudi, mengadakan tenaga kontrak sebanyak 10 orang, melaksanakan kerjasama dengan Advokat & konsultan hukum pada kantor Advokat CLEMENS AJI DWI WIJAYA, SH and PARTNERS dengan alamat : Jalan Sadewa III No 9 Pondok asri, Bareng lor Klaten Utara Jawa Tengah tanggal 03 Januari 2017 untuk menangani beberapa perkara perdata di Pengadilan Negeri Wonogiri.
- Rapat tanggal 02 Pebruari 2017, telah melakukan himbauan kepada semua pegawai terhadap SOP sebagai pedoman operasional, dan melakukan pengkinian SOP agar sesuai dengan perkembangan terbaru serta dapat meminimalisir kesalahan.
- Rapat tanggal 06 Maret 2017, selalu berupaya memenuhi likuiditas dengan melakukan perhitungan secara cermat terhadap keuntungan dan kerugiannya, telah melakukan pelantikan pejabat baru dan mutasi pada tanggal 10 Maret 2017.
- Rapat tanggal 07 April 2017, dalam pelaksanaan operasional sebisa mungkin menghindari linkage program, melakukan koordinasi dengan bupati terhadap rekrutmen pegawai.
- Rapat tanggal 01 Juni 2017, atas kejadian fraud telah dilakukan pembekalan spiritual building minimal 1 tahun sekali, dan melakukan perubahan pola mutasi pegawai.
- Rapat tanggal 08 Juli 2017, Tidak melakukan perubahan RKAT dengan berupaya memenuhi pencapaian RKAT karena beban kedepan cukup tinggi.

- Rapat tanggal 04 September 2017, meluncurkan kredit MENTARI pada tanggal 11 September 2017 dan melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai pada tanggal 07 September 2017.
- Rapat tanggal 06 Oktober 2017 telah melaksanakan kegiatan magang di PT BPR Surya Yudha dengan mengirimkan Saudara Muhamad Hasyim SE, Pemimpin cabang Girimarto dan saudara Joko santoso Kasubid Pengawasan Kredit dan NPL.
- Rapat tanggal 09 Nopember 2017 telah melakukan pengarahan kepada tenaga kontrak dan orang tua pada tanggal 11 November 2017, menyelesaikan RKAT/RBB 2018 yang telah disetujui Dewan Pengawas.

### iii. Pelaksanaan Operasional

Direksi telah melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tahun 2017 dengan cukup baik. Secara umum target tahun 2017 dapat tercapai dimana target Asset tercapai sebesar 100,58 %, Dana Pihak Ketiga tercapai 100,96 %, Kredit Yang Diberikan tercapai 95,00 % pendapatan tercapai 94,44 %, biaya terealisasi sebesar 92,78 % dan laba tercapai sebesar 101,74 %. Disisi lain target penurunan NPL sebesar 5,14 % baru terealisasi sebesar 6,09 %. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) cukup optimal tercermin dari perkembangan kredit dari tahun 2016 sebesar 10.204.852.389. Namun masih diperlukan peningkatan kualitas SDM dari sisi spiritual untuk menghindari adanya penyalahgunaan (fraud) oleh oknum pegawai. Pengelolaan biaya cukup efisien tercermin dari rasio BOPO sebesar 92,78%, Pengelolaan Likuiditas cukup baik tercermin dari cash ratio sebesar 19,80 % dan LDR sebesar 84,43%.

### iv. BMPK

Tidak terdapat pelanggaran BMPK, sebagaimana laporan bulanan BMPK yang telah dikirimkan.

### v. Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko

Direksi telah menerapkan Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dalam hal kebijakan, pelaksanaan dan laporan-laporan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hal ini

tercermin dari hasil penilaian self assessment dengan nilai dan peringkat komposit **1,68** (Sangat Baik). Kepatuhan terhadap ketentuan menunjukkan hasil sangat baik. Terlihat dari penilaian terhadap Manajemen yang menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan umum OJK di tahun 2017 terdapat kelemahan – kelemahan tata kerja dan pengawasan yang kemudian dijadikan evaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaksanaan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan Manajemen Risiko yang mengekspose Profil Risiko belum dilakukan karena sesuai dengan pentahapan, laporan Profil Risiko baru dilaksanakan untuk periode laporan semester kedua tahun 2018.

vi. Transparansi Kondisi keuangan dan non keuangan

Direksi telah membuat Laporan Keuangan Tahunan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik RUCHENDI MARDJITO RUSHADI & REKAN yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan ditunjuk sebagai pelaksana audit dengan Nomor KP-01/442/XII/PKS/2017 dan 040/KAP.RMR/SP.BPR/XII/2017. Ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SE OJK No.36/SEOJK.03/2017.

Sedangkan laporan Publikasi Triwulan IV posisi laporan bulan Desember 2017 sebagai bagian dari transparansi kondisi keuangan telah dimuat di Surat Kabar Harian Jawa Pos edisi Kamis tanggal 8 Maret 2017 di halaman Radar Wonogiri serta dipasang di papan pengumuman seluruh kantor baik kantor Pusat maupun Kantor Cabang dan Kantor Kas PD BPR BKK WONOGIRI.

Di dalam operasionalnya, PD. BPR BKK WONOGIRI tidak terlepas dari masalah hukum. Selama tahun 2017, tidak ada kasus pengaduan nasabah, namun ada 2 (dua) kasus gugatan pengadilan yang ditujukan kepada PD BPR BKK WONOGIRI.

Terdapat satu kasus pengaduan nasabah terselesaikan pada tahun 2017, yaitu pengaduan nasabah atas nama pemilik agunan kredit CV. Sahabat Alam melalui kuasa hukumnya Budi Sularyono, SH dengan surat pengaduan yang ditujukan Ke OJK Solo Nomor 180/0276/KompasHHAM-Erperta/XI/2016 perihal Pengaduan dan

diteruskan oleh OJK Solo Kepada Direksi PD. BPR BKK WONOGIRI sebagaimana Surat Nomor S-910/KO.032/2016 Perihal Pengaduan Nasabah. Adapun Penjelasan Direksi PD. BPR BKK WONOGIRI tentang kronologis permasalahan dan solusi penyelesaian telah disampaikan ke OJK Solo melalui Surat Nomor KP-01/033/SU/I/2017 Tanggal 05 Januari 2017 perihal Kronologis Permasalahan dan pengaduan ini terselesaikan secara damai pada bulan Agustus 2017.

Sedangkan kasus gugatan pengadilan yang juga didokumentasikan oleh Direksi, dilakukan oleh nasabah Widodo dari Kantor Cabang Baturetno yang dilayangkan ke Mahkamah Agung dalam tahap banding kasasi ke 2 (dua) dan melalui Kuasa Hukum PD BPR BKK WONOGIRI yaitu Clemens Aji Dwi Wijaya, SH. Sampai dengan laporan ini dibuat kasus tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Untuk kasus gugatan kedua yang juga didokumentasikan oleh Direksi, dilakukan oleh Agus Suranto dari Kantor Cabang Purwantoro yang dilayangkan ke Mahkamah Agung banding kasasi, melalui Kuasa Hukum PD BPR BKK WONOGIRI yaitu Clemens Aji Dwi Wijaya, SH.

#### **b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas**

Jumlah dan komposisi anggota Dewan Pengawas PD. BPR BKK WONOGIRI yaitu:

1. **Agus Prasutio, SH. MSi** sebagai Ketua Dewan Pengawas, lulus fit and proper test OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep : 30/KO.032/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan RUPS - LB tanggal 06 April 2016. Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas dilaporkan ke OJK melalui surat Nomor KP-01/979/VII/SU/2016 tanggal 26 Juli 2016 dan telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-430/KO.032/2016 tanggal 10 Agustus 2016.
2. **Bambang Haryadi, SH.MM** sebagai Anggota Dewan Pengawas, lulus fit and proper test berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur BI Nomor : 14/40/KEP.GBI/Slo/2012/RAHASIA tanggal 10 April 2012 dan RUPS-LB tanggal 15 Mei 2012, serta RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota dewan pengawas dilakukan

sebelum berakhirnya masa jabatan yaitu tanggal 30 Desember 2014. Pengangkatan Dewan Pengawas dilaporkan ke OJK melalui surat Nomor KP-01/79/I/SU/2015 tanggal 19 Januari 2015 dan telah ditatausahakan oleh OJK berdasarkan surat Nomor S-80/KO.421/2015 tanggal 10 Februari 2015.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dilakukan secara aktif maupun pasif. Pelaksanaan tugas pengawasan secara aktif yaitu dengan melakukan rapat pengurus yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Pengawas dan semua anggota Direksi yang hasilnya tertuang dalam Notulen Rapat. Sedangkan pengawasan secara pasif yaitu memantau perkembangan PD. BPR BKK WONOGIRI melalui sarana komunikasi dan media sosial yang ada.

### **c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite – Komite**

Tahun 2017 PD BPR BKK WONOGIRI belum wajib membentuk komite – komite kerja karena modal inti masih dibawah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Struktur Organisasi PD.BPR BKK WONOGIRI mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu :

- Nomor : 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- Nomor : 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- Nomor : 75/POJK.03/2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Sehingga Struktur organisasi PD BPR BKK WONOGIRI mengalami perubahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No 24/III/Kep.Dir/2017 berlaku tanggal 07 Maret 2017.

## **2. Kepemilikan Saham Direksi**

PD BPR BKK WONOGIRI merupakan Perusahaan Daerah dimana kepemilikan saham sepenuhnya adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham pengendali dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian tidak ada anggota Direksi yang memiliki saham di PD BPR BKK WONOGIRI.

Demikian pula semua anggota Direksi PD BPR BKK WONOGIRI tidak ada yang memiliki saham di perusahaan lainnya.

Adapun komposisi kepemilikan saham PD. BPR BKK WONOGIRI sebagaimana tabel berikut ini :

**1 = Rp 1.000**

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM	
	Nominal	%
1.Pemprov Jateng	15.060.000	50,60%
2. Pemkab Wonogiri	14.700.000	49,40%
TOTAL	29.760.000	100 %

### **3. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham BPR**

Semua anggota Direksi PD BPR BKK WONOGIRI tidak ada yang memiliki hubungan keluarga satu dengan yang lainnya.

Berikut ini adalah daftar orang tua anggota Direksi :

NO	NAMA	JABATAN	NAMA AYAH	NAMA IBU	ALAMAT
1	SUCIPTO, SE	DIRUT	ATMOREJONO	PONIYEM	Ds.KETRO RT.001 RW.004, Ds GUWOTIRTO KEC. GIRIWOYO, KAB. WONOGIRI
2	SUWARTO, SE	DIRPEM	SUKATMO	KARTI	CINDEREJO RT 002 RW 002 JATISARI JATISRONO
3	SARTI, SE.MM	DIRUM & KEPATUHAN	KARDI PARTOSUWITO	MANIYEM	JATIBEDUG, RT 005 RW 007, PURWOREJO WONOGIRI

### **4. Kepemilikan Saham Dewan Pengawas**

Sebagaimana anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas juga tidak ada yang memiliki saham di PD BPR BKK WONOGIRI, BPR lain maupun



Perusahaan lainnya. Anggota Dewan Pengawas merupakan bagian dari pemerintah yang ditunjuk oleh pemegang saham.

**5. Hubungan Keuangan dan atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Dewan Pengawas lain, Direksi dan atau Pemegang Saham**

Semua anggota Dewan Pengawas PD BPR BKK WONOGIRI tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lain, Direksi dan atau Pemegang Saham.

Berikut ini adalah daftar orang tua anggota Dewan Pengawas :

NO	NAMA	JABATAN	NAMA AYAH	NAMA IBU	ALAMAT
1	AGUS PRASUTIO, SH. MSi	Ketua Dewan Pengawas	R. Tikno Hartono	Koendari	Graha Wahid Paris Blok B/3B Sambiroto RT 002 RW 010 Tembalang Semarang
2	BAMBANG HARYADI, SH.MM	Anggota Dewan Pengawas	Soepangat	Rumiyati	Jl. Pelem I/7 Kajen Rt 02/011 Giripurwo Wonogiri

**6. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan Berdasarkan RUPS**

Sebagai Perusahaan Daerah, penetapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 35 tahun 2012 yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2013.

Berikut ini adalah daftar remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi dan Dewan Pengawas selama tahun 2017 :

- Berupa Uang Tunai

Jenis Remunerasi	Direksi			Dewan Pengawas	
	Sucipto, SE	Suwarto, SE	Sarti, SE.MM	Agus Prasutio	Bambang Haryadi
1. Gaji/Honor	Rp.252.000.000,-	Rp.201.600.000,-	Rp.201.600.000,-	Rp.100.800.000,-	Rp. 80.640.000,-
1. THR	Rp. 42.000.000,-	Rp. 33.600.000,-	Rp. 33.600.000,-	Rp. 16.800.000,-	Rp. 13.440.000,-
2. Tamsil	-	-	-	-	-
3. Kompensasi berbasis saham	Rp 11.391.237,-	Rp 9.682.552,-	Rp 9.682.552,-	Rp 3.797.079,-	Rp. 7.973.866,-
<b>Jumlah penerimaan keseluruhan</b>	<b>Rp 305.391.237,-</b>	<b>Rp 244.882.552,-</b>	<b>Rp 244.882.552,-</b>	<b>Rp 121.397.079,-</b>	<b>Rp 102.053.866,-</b>

- Berupa fasilitas lain

Jenis Remunerasi	Direksi			Dewan Pengawas	
	Sucipto, SE	Suwarto, SE	Sarti, SE.MM	Agus Prasutio	Bambang Haryadi
1. Perumahan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada
2. Transportasi	Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas	Tidak ada	Tidak Ada
3. Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS	BPJS	Tidak ada	Tidak Ada
4. Telp Cell	Android	Android	Android	Android	Tidak Ada

## 7. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Kebijakan mengenai sistem penggajian pegawai PD BPR BKK WONOGIRI juga mengacu pada Peraturan Gubernur No. 35 tahun 2012 yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 tahun 2013.

Daftar gaji pegawai dan pengurus tertinggi dan terendah beserta ratio gaji tertinggi dan terendah sebagaimana daftar berikut ini:

No	Uraian	Gaji tertinggi (Rp)	Gaji terendah (Rp)	Rasio
1	Dewan pengawas	8.400.000	6.720.000	56 % : 44 %
2	Direksi	21.000.000	16.800.000	56 % : 44 %
3	Pegawai	9.289.040	2.500.320	79 % : 21 %
4	Direksi dan Dewas	21.000.000	6.720.000	76 % : 24 %
5	Direksi dan Pegawai	21.000.000	2.500.320	89 % : 11 %

## 8. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

### a. Jumlah Rapat yang Diselenggarakan Dalam 1 (satu) Tahun

Selama tahun 2017, Rapat Dewan Pengawas bersama dengan Direksi dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali. Sebagian besar rapat diselenggarakan di Ruang Direktur Utama dan dihadiri oleh semua anggota Dewan Pengawas dan semua Anggota Direksi. Hasil rapat dituangkan dalam Notulen Rapat yang diarsipkan di Ruang Kerja Dewan Pengawas PD BPR BKK WONOGIRI.

**b. Jumlah Rapat yang Dihadiri secara Fisik dan atau melalui Teknologi Telekonferensi**

Setiap rapat Dewan Pengawas dan Direksi dihadiri secara fisik. Sampai dengan saat ini belum pernah dilaksanakan rapat melalui media Teknologi Telekonferensi.

**c. Kehadiran masing-masing anggota setiap rapat**

Semua rapat yang telah terselenggara selama tahun 2017 selalu dihadiri oleh semua anggota Dewan Pengawas dan semua anggota Direksi.

**d. Topik atau Materi Rapat**

Dari 9 (sembilan) kali rapat yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Pengawas dan semua anggota Direksi dapat di ringkas materi rapat sebagai berikut :

No	Tanggal	Materi Rapat
1	27 Januari 2017	Pengisian jabatan kosong melalui test penjarinagn calon pejabat Pengadaan tenaga kontrak sebanyak 20 orang Penunjukan bantuan hukum jika ada kasus yang memerlukan bantuan hukum saja,tidak MOU secara terus menerus.
2	02 Februari 2017	SOP sebagai pedoman operasional, terus diperbaiki agar sesuai dengan perkembangan dan meminimalir resiko.
3	06 Maret 2017	Pemenuhan likuiditas dihitung dengan cermat, untung dan ruginya. Persetujuan pengisian dan mutasi jabatan serta pemberian sangsi kepada pejabat yang kinerjanya tidak maksimal atau selalu mengalami penurunan kinerja.
4	07 April 2017	Dalam pelaksanaan operasional sebisa mungkin hindari linkage program. Sebelum proses rekrutmen harus koordinasi dengan Bupati.
5	01 Juni 2017	Dengan kejadian fraud yang beruntun setiap tahun agar pola mutasi dievaluasi , pembekalan sriritual agar rutin dilakukan minimal satu kali dalam setahun dan direksi wajib melakukan pembinaan secara berkala.
6	08 Juli 2017	Menyetujui tidak adanya perubahan RKAT mengingat beban kita kedepan cukup tinggi
7	04 September 2017	Peluncuran kredit mentari Pelaksanaan undian tamades

		Pengangkatan pejabat dan mutasi pegawai.
8	06 Oktober 2017	Pelaksanaan magang pegawai di PT BPR SURYA YUDHA
9	09 Nopember 2017	Pelaksanaan pembekalan kepada pegawai kontrak Pengangkatan dan penempatan pegawai kontrak Mutasi staf administari Kosep RKAT 2018

## **9. Jumlah Penyimpangan Intern (internal fraud)**

### **a. Jumlah Internal Fraud yang telah diselesaikan**

Tahun 2017 ada 2 (satu) kasus fraud yang telah diselesaikan yaitu Kasus Fraud yang terjadi di Kantor Cabang Purwantoro dengan pelaku Sdr. Anang Listiyanto, SE. Pegawai yang bersangkutan menyalah gunakan tabungan nasabah dengan modus adanya setoran tabungan namun tidak dimasukkan kedalam pembukuan bank, penarikan tabungan nasabah dengan cara membubuhkan tanda tangan atas nama Nasabah pada slip penarikan, adanya perbedaan angka dalam penarikan tabungan antara pembukuan bank dengan yang tertera pada buku tabungan nasabah, setoran kredit nasabah tidak dimasukkan dalam pembukuan bank, adanya titipan pelunasan kredit, namun tidak masuk dalam pembukuan bank, ada titipan angsuran namun belum dimasukkan kedalam transaksi bank.

Pegawai yang bersangkutan telah menerima Surat Keputusan pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagaimana SK Direksi Nomor 53/V/Kep.Dir/2017 tanggal 23 Mei 2017.

Sedangkan kasus fraud yang terjadi di Kantor Cabang Baturetno dengan Pelaku Sdr. Marso yang terjadi pada tahun 2016, pegawai yang bersangkutan menerima Surat Keputusan pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagaimana SK Direksi Nomor 09/I/Kep.Dir/2017 Tanggal 05 Januari 2017.

### **b. Jumlah Internal Fraud yang sedang dalam proses penyelesaian internal BPR**

Pada tahun 2017 tidak ada kasus fraud yang masih dalam proses penyelesaian Internal BPR

**c. Jumlah Internal Fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya.**

Tidak ada internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya dalam tahun 2017, karena hanya terdapat 2 (dua) kasus yang masing – masing sudah ditangani.

**d. Jumlah Internal Fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum**

Untuk tahun 2017, tidak ada kasus hukum yang ditindaklanjuti melalui proses hukum .

Daftar Internal Fraud yang terjadi di PD. BPR BKK WONOGIRI tahun 2016 dan 2017 secara keseluruhan sebagaimana tabel berikut ini :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	2 Kasus	2 Kasus	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		2 Kasus		Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

**10. Permasalahan Hukum**

**a. Jumlah Permasalahan Hukum Perdata dan Pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)**

Tahun 2017 ada kasus permasalahan hukum Perdata dan Pidana yang dihadapi dan telah diupayakan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

**b. Jumlah Permasalahan Hukum Perdata dan Pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.**

Kasus hukum perdata yang dihadapi PD BPR BKK WONOGIRI selama tahun 2017 ada 2 (dua ) kasus yaitu :

1. Gugatan oleh nasabah Widodo dari Kantor Cabang Baturetno yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Wonogiri melalui Kuasa Hukumnya Edi Santoso, SH.MH, Banu Umbara, SH dan Ernawati, SH tanggal 20 Desember 2016. Relas Panggilan dilayangkan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 29 Desember 2016. Sesuai dengan surat dari Pengadilan Negeri Wonogiri No: W.12-U29/1077/HK.02/VIII/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 Perihal permohonan banding perkara perdata.

Melalui surat Nomor : W.12.U/3085/PDT.00/12/2017 Tanggal 27 Desember 2017 perihal pengiriman kembali berkas banding.

Sampai saat ini proses pengadilan masih berjalan dan menunggu keputusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

2. Gugatan oleh nasabah Agus Suranto dari kantor cabang Purwantoro yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Wonogiri melalui kuasa hukumnya Joko priyadi, SH dan Ariyanto, SH tanggal 3 Januari 2017. Relas panggilan dilayangkan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 9 Januari 2017. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada kuasa terbanding nomor 01/Pdt.G/2017/PN.Wng tanggal 16 Agustus 2017.

Surat no : W.12-U29/1076/HK.02/VIII/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 tentang permohonan Banding perkara perdata no 01/Pdt.G/2017/PN.Wng serta relas pemberitahuan putusan banding kepada terbanding Nomor 386/Pdt/2017/PT.SMG.jo.No.01/Pdt.G/2017PN.Wng tanggal 15 Desember 2017.

Sampai saat ini proses pengadilan masih berjalan dan menunggu keputusan dari Pengadilan Negeri Wonogiri.

Adapun permasalahan hukum yang dihadapi PD. BPR BKK WONOGIRI sebagaimana tabel berikut ini :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	2 Kasus	Nihil
Total	2 kasus	Nihil

#### 11. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2017 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana rincian pada tabel berikut ini :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

#### 12. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) adalah wujud kepedulian PD. BPR BKK WONOGIRI terhadap lingkungan sosial. Selama tahun 2017 ada beberapa kegiatan yang bertujuan sosial yang telah dilaksanakan yaitu:


- Bantuan Kambing kurban untuk Kec. Paranggupito dan Kec. Giritontro.
- Bantuan Bencana Alam Kab. Banjarnegara.
- Bantuan anak yatim piatu dan kaum duafa di wilayah Kab. Wonogiri.
- Bantuan Renovasi masjid Al hikmah Kec. Giriwoyo, Masjid Baiturrohman Wonogiri, Masjid Jamprit Baturetno, Masjid Rutan Wonogiri dan Masjid Al Huda Kec. Tirtomoyo
- Bantuan Bibit Sengon untuk masyarakat Kecamatan Jatiroto
- Bantuan kepada beberapa Pondok Pesantren di wilayah Kabupaten Wonogiri.
- Bantuan kepada Panti Asuhan dan Panti Wredha (Jompo) di wilayah Kab. Wonogiri.
- Bantuan Air Bersih di Kecamatan Paranggupito, Kecamatan Giriwoyo dan Kecamatan Giritontro.

- i. Bantuan Bedah Rumah di Kec. Wuryantoro.
- j. Bantuan Solo Peduli.
- k. Bantuan Jamban kepada masyarakat yang tidak mampu.
- l. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Slogohimo
- m. Bantuan kepada Penyandang cacat di wilayah kab. Wonogiri
- n. Bantuan Difabel (PADIWO) Kab. Wonogiri
- o. Bantuan Khitanan Masal
- p. Bantuan paket perangkat sholat kepada mantan Napi
- q. Bantuan Paket Sekolah

#### **PENUTUP**

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola ini kami sampaikan untuk memenuhi kewajiban pelaporan penerapan tata kelola sebagaimana diatur POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Wonogiri, 13 April 2018


 Dewan Pengawas  
 PD BPR BKK WONOGIRI  
**AGUS PRASUTIO, S.H.M.Si**  
 Ketua

PD.Bank Perkreditan Rakyat  
 BKK WONOGIRI  
  
**SUCIPTO, SE**  
 Direktur Utama